



DAMPAK SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) DAN TECHNICAL BARRIER TO TRADE (TBT) TERHADAP EKSPOR KOMODITAS TEH DI INDONESIA

ABEDNEGO SURANTA KARO-SEKALI¹, TAVI SUPRIANA²

^{1,2}Departemen Agribisnis, Fakultas Pertanian Sumatera Utara
E-mail: abednegoks@unprimdn.ac.id

ABSTRAK

Komoditas teh Indonesia ditenggarai terdampak pada hambatan non tarif di beberapa tujuan ekspor. Hal ini sangat merugikan Indonesia karena Teh merupakan komoditas potensial dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Sanitary and Phytosanitary (SPS) dan Technical Barrier to Trade (TBT) terhadap ekspor teh di beberapa negara tujuan utama periode 2013-2017. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif menggunakan pendekatan inventory (frequency index dan coverage ratio) dan gravity model. Hasil pendekatan inventory menunjukkan Amerika Serikat sebagai negara yang memberlakukan hambatan non tariff terbanyak. Hasil estimasi menunjukkan coverage ratio SPS dan coverage ratio TBT berpengaruh nyata terhadap nilai ekspor teh Indonesia selain variabel GDP riil negara tujuan utama, nilai tukar riil negara tujuan utama, jarak ekonomi. Variabel SPS menunjukkan nilai koefisien negatif, sementara variabel TBT menunjukkan nilai koefisien positif. Kata kunci: ekspor, gravity model, hambatan non tarif, pendekatan inventory, teh.

Kata Kunci: Pendekatan, Ekspor, Komoditas, Teh, Indonesia

Pendahuluan

WTO merupakan badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Indonesia merupakan salah satu Negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU No. 7 tahun 1994. Tujuan utama dari persetujuan pembentukan WTO adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Dalam bidang pertanian, kerjasama multilateral diwujudkan oleh WTO dalam bentuk perjanjian pertanian, Agreement on Agriculture (AoA). Tujuannya adalah reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian, dalam rangka

menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. Program reformasi ini berisi komitmen komitmen spesifik untuk mengurangi subsidi domestik, subsidi ekspor dan meningkatkan akses pasar melalui penciptaan peraturan dan disiplin yang kuat dan efektif.

Penerapan perdagangan dikancah hubungan bilateral negara tidak terlepas dari hambatan perdagangan, baik itu hambatan tarif maupun non tarif. Penetapan tingkat tarif untuk komoditas seluruh dunia yang berlaku bagi negara maju maupun negara berkembang, telah diatur dan ditetapkan oleh WTO. Melalui perjanjian preferensi dalam perdagangan global, berbagai macam bentuk tarif telah

semakin berkurang. Adanya batasan tarif ini membuat negara memberlakukan tindakan non tarif (non tariff measures/ NTMs) sebagai bentuk proteksi pada produsen domestik dalam menghadapi persaingan impor dengan produk asing (Dahar 2014). Kondisi tersebut konsekuensi dari penandatanganan Uruguay Round WTO harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam GATT/WTO yaitu melakukan liberalisasi perdagangannya dan tidak melakukan hambatan-hambatan perdagangan dalam bentuk tarif impor, pajak dan lain-lain untuk memproteksi produksi dalam negeri. Oleh karena itu, saat ini banyak negara-negara untuk mengamankan kepentingan masyarakatnya dan ekonominya dengan menerapkan standarisasi sebagai wujud instrumen melakukan hambatan perdagangan secara tersamar untuk melindungi kepentingan negaranya.

Penerapan kebijakan NTM (non tariff measures), terkhusus untuk SPS (Sanitary and Phytosanitary) dan TBT (technical barrier to trade) berlaku di banyak Negara. Kebanyakan negara-negara mengaplikasikan kebijakan SPS lebih di fokuskan pada sektor pertanian dan produk peternakan, sebagai wujud control yang berperan untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan konsumen serta perlindungan terhadap lingkungan. UNCTAD dalam Dahar (2014) akibat dari penggunaan tersebut, lebih dari 60% dari produk yang berhubungan dengan pangan ditemukan akan terpengaruh oleh setidaknya salah satu dari bentuk tindakan SPS ini. Di sisi lain, TBT dapat diterapkan pada sektor yang lebih luas dan memang ditemukan lebih merata penerapannya pada seluruh sektor ekonomi.

Dahar (2014) menyatakan tidak sedikit penelitian yang mengkaji mengenai hambatan non tarif di kawasan Asia. Penelitian tersebut antara lain adalah Aloka et al. mengenai dampak NTM pada ekspor pertanian di Sri Lanka; Nguyen tentang ekspor Vietnam; Chen et al. mengenai efek SPS dari perspektif eksportir di Cina. Selain itu kebijakan NTM

(non tariff measures), terkhusus untuk SPS (sanitary and phytosanitary) dan TBT (technical barrier to trade) berlaku juga di kawasan Uni Eropa, hal tersebut memiliki konsekuensi logis yakni eksportir teh yang ingin memasuki pasar UE harus memperhatikan berbagai persyaratan ditetapkan oleh mitra dagang dan pemerintah UE. Persyaratan tersebut meliputi standar mutu yang biasanya juga dikaitkan dengan persyaratan lingkungan, kesehatan, keamanan, perburuhan dan etika bisnis. Hambatan non tarif merupakan salah satu isu penting dalam skema perdagangan internasional.

Hambatan non tarif diwacanakan dan diberlakukan dari tahun ke tahun sesuai dengan kesepakatan tiap-tiap negara. Pemberlakuan hambatan non tarif melahirkan indikasi dan pemikiran yang memposisikan hambatan ini sebagai salah satu pemicu penurunan ekspor komoditi tertentu suatu negara. Anggoro & Widyastutik (2016), menyatakan bahwasanya kawasan Uni Eropa memiliki regulasi yang diberlakukan bagi negara anggotanya sebagai patokan dan arah hubungan multilateral dalam perdagangan, namun penerapan aplikasinya berbeda di setiap negara anggota.

Menurut Trabelsi (2013) saat ini, bentuk hambatan non tarif lebih cenderung diterapkan pada produk-produk pertanian. Akibatnya dengan adanya hambatan non tarif secara langsung menyebabkan masalah baru bagi Negara-negara berkembang karena ekspor utama negara-negara berkembang adalah produk pertanian. Salah satu negara berkembang yang terkena dampak dari pemberlakuan hambatan non tarif yaitu Indonesia. Indonesia mempunyai banyak komoditi unggulan, salah satunya adalah komoditas teh.

Teh merupakan salah satu komoditas ekspor perkebunan yang strategis bagi Indonesia. Teh Indonesia dikenal memiliki kekhasan dibandingkan penghasil teh negara-negara lain, dimana mempunyai kandungan antioksidan yang

berguna untuk memproteksi radikal bebas. Komoditas teh memiliki peranan penting dalam perekonomian, ditandai dengan sekitar Rp 1.53 triliun Komoditas teh juga berperan sebagai sumber penyerapan tenaga kerja yang cukup besar.

Menurut data UN Comtrade Indonesia merupakan eksportir terbesar di dunia. Nilai ekspor teh mencapai 1.83% atau sebesar 74.58 juta USD. Namun ekspor teh Indonesia dari tahun 2013-2017 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 nilai ekspor teh sebesar 117.02 juta USD dengan volume sebesar 57.7 ribu USD, kemudian pada tahun 2014 nilai ekspor dan volume ekspor mengalami penurunan masing-masing sebesar -18.35% dan -6.85%. Penurunan volume terus berlanjut hingga di tahun 2017, sementara nilai ekspor mengalami penurunan sampai tahun 2016 sedangkan pada tahun 2017 nilai ekspor teh sudah sedikit membaik.

Menurut Kementerian Perdagangan, penurunan ekspor teh Indonesia akibat dari terbatasnya lahan perkebunan, kualitas yang rendah, target standardisasi yang belum terpenuhi di tingkat nasional dan internasional serta adanya beberapa indikasi kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara tujuan ekspor yang berpotensi menghambat ekspor teh Indonesia. Pada penelitian ini dibahas lebih lanjut mengenai analisis dampak Sanitary and Phytosanitary (SPS) dan Technical Barrier to Trade (TBT) terhadap ekspor teh Indonesia ke negara tujuan utama dan diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan implikasi kebijakan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor teh ke negara tujuan utama.

1. Kerangka Teori

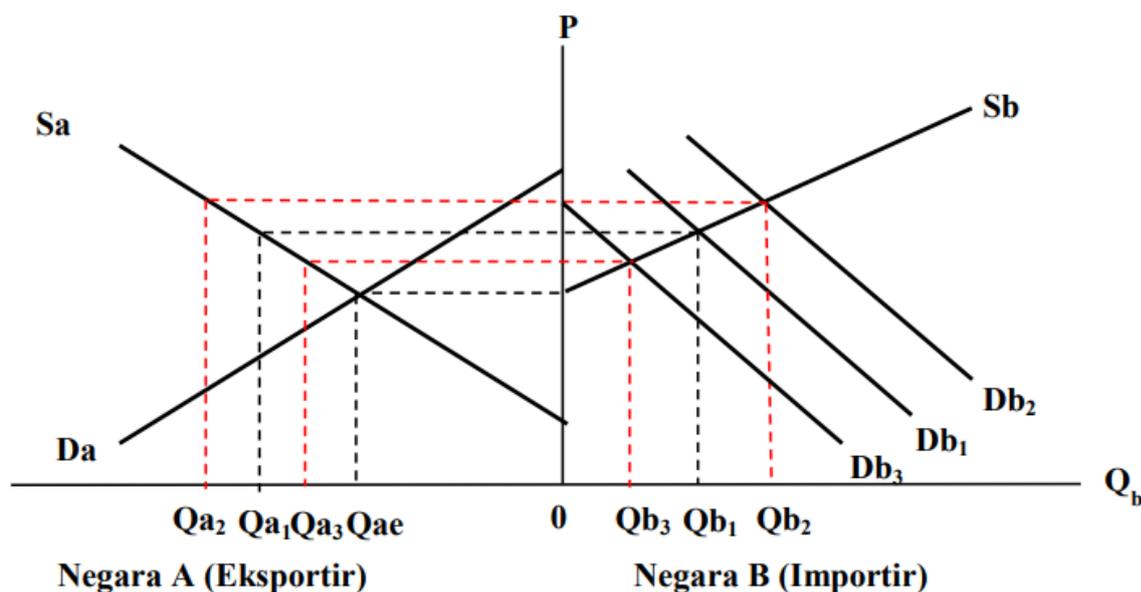
Adanya penetapan tingkat tarif impor oleh WTO, banyak negara-negara yang memberlakukan hambatan non tarif untuk melindungi kesehatan konsumen dan produsen domestik dari persaingan dagang. Persyaratan yang ditetapkan negara mitra dagang meliputi standar mutu yang dapat menjadi hambatan untuk

para eksportir, khususnya Indonesia. Secara teori, adanya hambatan non tarif yang diberlakukan oleh Negara tujuan ekspor dapat menghasilkan dua kemungkinan yang terjadi pada ekspor, yaitu bisa meningkatkan ekspor atau bahkan sebaliknya, menurunkan ekspor yang akan dijelaskan pada Gambar 1. Kemungkinan terjadi peningkatan ekspor ini disebabkan oleh adanya peningkatan demand dari negara tujuan ekspor karena bertambahnya kepercayaan konsumen di negara tujuan ekspor terhadap kualitas dan standar mutu produk atau komoditas impor, sementara kemungkinan terjadi penurunan ekspor karena negara eksportir tidak mampu memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor.

Gambar 1 menjelaskan mekanisme pengaruh dari adanya pemberlakuan hambatan non tarif oleh negara tujuan ekspor terhadap demand dan supply komoditas negara eksportir. Diasumsikan negara A sebagai negara eksportir dan negara B sebagai negara importir. Harga suatu komoditas di negara A sebesar P_a dan di negara B harga suatu komoditas sebesar P_b (ceteris paribus). Jika negara A dapat memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh negara B, maka terjadi peningkatan demand komoditas negara A. Hal ini disebabkan karena bertambahnya kepercayaan konsumen di negara B terhadap kualitas komoditas negara A. Sehingga kurva demand negara B bergeser dari D_{b1} ke D_{b2} . Lalu, peningkatan demand negara B ini berpengaruh terhadap peningkatan ekspor di negara A dilihat dari peningkatan supply negara A dari Q_{a1} ke Q_{a2} serta tingkat harga yang ditawarkan juga lebih tinggi daripada sebelumnya. Perubahan harga ini ditimbulkan dari meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan oleh negara A seperti biaya penyesuaian standardisasi sampai dengan biaya peningkatan teknologi untuk memenuhi standar kebijakan hambatan non tarif yang diberlakukan oleh negara B. Sementara, jika negara A tidak mampu memenuhi

standar mutu yang telah ditetapkan oleh negara B, maka terjadi penurunan demand komoditas negara A di negara B. Fenomena seperti ini biasanya terjadi pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sehingga kurva demand negara B bergeser dari Db_1 ke Db_3 . Lalu, penurunan demand negara B ini berpengaruh terhadap penurunan ekspor di negara A dilihat dari penurunan

supply negara A dari Q_{a1} ke Q_{a3} serta penurunan tingkat harga yang ditawarkan daripada sebelumnya. Perubahan harga ini karena kurang efisiennya negara A dalam menangani biaya penyesuaian standardisasi sampai dengan biaya peningkatan teknologi untuk memenuhi standar kebijakan hambatan non tarif yang diberlakukan oleh negara B.



Gambar 1. Dampak pemberlakuan hambatan non tarif oleh negara tujuan ekspor

Metode Penelitian

1.1. Jenis dan Sumber Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi data kuantitatif tahunan selama periode tahun 2013 – 2018 dengan cross section negara tujuan ekspor utama meliputi Malaysia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Polandia, Ukraina, dan Rusia. Data yang digunakan antara lain Non-Tariff Measures (NTMs), Ekpor dan impor teh Hitam, GDP riil negara tujuan ekspor the, Nilai tukar rupiah, Jarak geografis dan IHK yang diperoleh dari I-TIP WTO, UN COMTRADE dan Worldbank.

1.2. Metode Analisis Data.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan inventory dan analisis kuantitatif yaitu analisis data panel dengan gravity model. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Ms. Excel 2007 dan Eviews 10.

1.2.1. Analisis Deskriptif.

Analisis deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran umum kebijakan non tarif yang diberlakukan oleh negara-negara tujuan ekspor. Analisis kebijakan hambatan non-tarif dilakukan oleh

pendekatan inventory yang menggunakan frequency index dan coverage ratio sebagai indikator. Frequency index menghitung ada atau tidaknya kebijakan non tarif dan persentase seringnya suatu produk yang menggunakan satu atau lebih kebijakan non tarif (UNCTAD 2013). Sementara coverage ratio merupakan persentase dari perdagangan suatu produk yang dikenakan kebijakan non tarif pada Negara pengimpor dan memberikan ukuran pentingnya kebijakan non tarif impor secara keseluruhan. Nilai frequency index dan coverage ratio berada pada rentang nilai 0–100. Jika nilai frequency index mendekati 0 akan menunjukkan bahwa semakin sedikit penggunaan hambatan non tarif oleh suatu negara. Sebaliknya jika nilai frequency index mendekati 100 menunjukkan bahwa semakin banyak penggunaan hambatan non tarif oleh suatu negara. Nilai coverage ratio yang semakin kecil menunjukkan semakin sedikitnya cakupan produk yang terkena kebijakan non tarif, sedangkan coverage ratio yang semakin besar menunjukkan semakin luasnya cakupan produk yang terkena kebijakan non tarif. Kedua indikator tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$Fijt = \left[\frac{\sum (Dkt Mkt)}{\sum MkT} \right] \times 100$$

$$Cijt = \left[\frac{\sum (Dkt Vkt)}{\sum VkT} \right] \times 100$$

Dimana,

Fijt = frequency index negara pengekspor i ke negara pengimpor j pada tahun t (%)

Cijt = coverage ratio negara pengekspor i ke negara pengimpor j pada tahun t (%)

Dkt = variabel dummy yang menunjukkan ada atau tidaknya satu atau lebih

NTMs pada produk k pada tahun t

MkT = jumlah produk k dengan total tahun dari jumlah yang diimpor

VkT = nilai produk k dengan total tahun dari jumlah yang diimpor

j = negara pengimpor

i = negara pengekspor

k = produk yang diimpor

t = tahun diberlakukannya NTMs

T = total tahun dari jumlah yang diimpor ke negara tujuan

1.2.2. Gravity Model

Gravity model merupakan alat analisis yang digunakan dalam mengukur dampak hambatan non tarif terhadap arus ekspor komoditas teh Indonesia di Negara tujuan utama ekspor. Beberapa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah GDP riil negara tujuan utama, nilai tukar riil negara tujuan utama, jarak ekonomi bilateral antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor, harga komoditas teh yang diimpor oleh negara tujuan, tren, dan pemberlakuan hambatan non tarif (SPS dan TBT). Periode waktu data yang digunakan dari tahun 2013 – 2018. Model yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui dampak hambatan non tarif baik SPS maupun TBT, merujuk pada model gravity pada penelitian Darhyati et al. (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan coverage ratio untuk menghitung hambatan non tarif SPS dan TBT sebagai variabel independennya. Model dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln EX_{jt} = & \alpha + \beta_1 \ln GDPNT_{jt} + \beta_2 \ln RER_{jt} \\ & + \beta_3 \ln EDIST_{jt} \\ & + \beta_4 \ln PRICE_{jt} \\ & + \beta_5 \ln T_{jt} + \beta_6 \ln CRSPS_{jt} \\ & + \beta_7 \ln CRTBT_{jt} + \mu_{jt} \end{aligned}$$

Dimana: $\beta_1, \beta_2 > 0, \beta_3, \beta_4, \beta_5 < 0$ dan $\beta_6, \beta_7 \neq 0$

EX_{jt} = nilai ekspor komoditas teh Indonesia ke negara tujuan utama j pada tahun t (juta USD)

$GDPNT_{jt}$ = GDP riil negara tujuan utama j pada tahun t (juta USD)

RER_{jt} = nilai tukar riil negara tujuan utama terhadap dollar Amerika Serikat pada tahun t (LCU/USD)

$EDIST_{jt}$ = jarak ekonomi antara negara tujuan utama j dan Indonesia tahun t

$PRICE_{jt}$ = harga komoditas teh Indonesia di negara tujuan utama tahun t (USD/kg)

T_{jt} = tren ekspor komoditas teh Indonesia ke negara tujuan utama j pertahun

$CRSPS_{jt}$ = coverage ratio SPS negara pengimpor j terhadap komoditas teh Indonesia pada tahun t (%)

$CRTBT_{jt}$ = coverage ratio TBT negara pengimpor j terhadap komoditas teh Indonesia pada tahun t (%)

μ_{jt} = random error

α = konstanta (intercept)

β_k = parameter yang diduga (n= 1,2,.....,4)

i = Indonesia

j = negara tujuan ekspor

t = tahun yang diteliti

Hasil dan Pembahasan

1.3. Kinerja Komoditas teh di Indonesia

Luas area lahan perkebunan teh di Indonesia pada tahun 2013-2018 selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 3.37% serta rata-rata penurunan pertahun sebesar 1.88%. Penurunan luas areal perkebunan ini akibat dari adanya konversi (alih fungsi) lahan dari komoditas teh menjadi komoditas kelapa sawit. Alasan terjadi konversi lahan karena komoditas kelapa sawit dinilai lebih menguntungkan. Sementara pada tahun yang sama produksi teh Indonesia cenderung mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2015 produksi teh menurun secara signifikan sebesar 14.09%. Penurunan produksi ini selain disebabkan karena lahan, disebabkan juga karena biaya produksi yang tinggi, peralatan produksi yang belum modern, dan sumber daya manusia. Sementara produktivitas teh secara keseluruhan mengalami peningkatan.

Perkebunan teh di Indonesia menurut pengusahaannya dibedakan menjadi Perkebunan Besar (PB) dan Perkebunan Rakyat (PR). Perkebunan Besar terdiri

dari Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Areal PB maupun PR tersebar di beberapa provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dilihat dari luas areal terbesar pada PB maupun PR, provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan luas areal teh terluas di Indonesia pada tahun 2017 yaitu 40,349 hektar (68.43 %) untuk PB dan 45,181 hektar (86.23 %) untuk PR. Sentra produksi teh di Indonesia juga berada di provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada tahun 2017 bahwa 99,051 ton (70.54%) produksi teh dari Jawa Barat, sementara provinsi Jawa Tengah menjadi produsen teh kedua di Indonesia yang memiliki tingkat produksi yang sangat jauh dengan provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 12,019 ton (8.56%).

Menurut International Tea Committee, Indonesia termasuk ke dalam sepuluh negara penghasil teh maupun negara pengekspor teh terbesar di dunia. Ekspor komoditas teh Indonesia mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam devisa Indonesia. Letak geografis, sumber daya alam Indonesia yang mendukung, dan banyaknya manfaat yang didapat dalam mengkonsumsi komoditas teh seperti mencegah terjadinya pertumbuhan kanker, mencegah penyakit jantung, mengurangi kadar kolesterol membuat tingginya permintaan komoditas teh di dunia. Hal ini menjadikan komoditas teh sebagai salah satu komoditas ekspor yang sangat potensial bagi Indonesia sehingga perlu dikembangkan. Kinerja perdagangan komoditas teh Indonesia pada tahun 2017 ke negara tujuan utama didominasi oleh Rusia sebesar 15.24 juta USD, diikuti oleh Malaysia sebesar 11.1 juta USD, dan Pakistan sebesar 9.44 juta USD. Selama beberapa tahun terakhir, Rusia menjadi Negara tujuan ekspor utama yang mendominasi ekspor teh Indonesia karena konsumsi komoditas teh yang tinggi di negara tersebut. Neraca perdagangan komoditas teh mengalami surplus setiap tahunnya di seluruh negara tujuan utama

meskipun cenderung mengalami penurunan.

1.4. Perkembangan GDP Riil Negara Tujuan Utama Ekspor Komoditas teh
GDP riil, nilai tukar riil, jarak ekonomi, dan harga ekspor merupakan faktor yang dapat memengaruhi nilai ekspor komoditas teh Indonesia. GDP yang digunakan merupakan GDP konstan 2010, sehingga mengukur tingkat pertumbuhan nilai barang dan jasa suatu negara secara riil menurut harga konstan. GDP riil dapat merepresentasikan ukuran daya beli masyarakat dalam suatu negara terhadap barang dan jasa. GDP riil negara tujuan ekspor komoditas teh Indonesia menunjukkan tren yang positif pada tahun 2013-2018. Kondisi ini menandakan adanya pertumbuhan nilai barang dan jasa yang positif sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan di negara tujuan ekspor. Amerika Serikat sebagai pengimpor komoditas teh Indonesia keempat memiliki nilai GDP riil tertinggi, sementara Ukraina sebagai pengimpor komoditas teh Indonesia terkecil memiliki nilai GDP riil terkecil juga.

1.5. Perkembangan GDP Riil Negara Tujuan Utama Ekspor Komoditas The
Nilai tukar riil antara mata uang negara tujuan utama ekspor dengan mata uang dolar Amerika Serikat dengan dihitung dari nilai tukar nominalnya dikalikan dengan rasio tingkat harga di Amerika Serikat dengan negara tujuan utama ekspor. Sehingga nilai tukar riil ini dapat dijadikan sebagai tingkat harga untuk memerdagangkan barang domestik dengan barang luar negeri yang tergantung pada harga barang dalam tingkat nilai tukar yang berlaku. Perkembangan nilai tukar riil negara tujuan utama ekspor yang berfluktuatif namun secara keseluruhan cenderung mengalami depresiasi pada tahun 2013-2018. Depresiasi nilai tukar riil negara tujuan utama ekspor menandakan bahwa harga di negara tujuan lebih murah

dibandingkan dengan harga di Indonesia dalam satuan harga USD.

1.6. Perkembangan Jarak Ekonomi Negara Tujuan Utama Ekspor Komoditas teh

Jarak ekonomi dapat mewakili biaya transportasi yang digunakan dalam perdagangan. Biaya transportasi akan mendorong tingkat harga yang diterima oleh konsumen di negara tujuan ekspor. Perkembangan jarak ekonomi dari hasil perhitungan yang digunakan dari laporan Analisis Hubungan Perdagangan Indonesia dengan Selatan-Selatan yang dikeluarkan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Keuangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015. Secara keseluruhan jarak ekonomi negara tujuan utama ekspor komoditas teh Indonesia pada tahun 2013-2018 mengalami penurunan. Penurunan pada jarak ekonomi menandakan bahwa biaya transportasi yang harus dibayarkan dalam perdagangan semakin rendah.

1.7. Perkembangan Harga Komoditas teh Negara Tujuan Utama Ekspor

Harga merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi permintaan dan penawaran barang dan jasa yang di ekspor. Perkembangan harga ekspor komoditas teh Indonesia di negara tujuan utama berfluktuatif namun cenderung menurun. Harga ekspor komoditas teh yang rendah akan meningkatkan jumlah permintaan teh hitam.

1.8. Analisis Deskriptif

1.8.1. Pemberlakuan Hambatan Non Tarif pada Komoditas teh Indonesia

Hambatan non tarif telah menjadi isu penting dalam perdagangan internasional di beberapa tahun terakhir dan sudah banyak diterapkan oleh Negara maju maupun negara berkembang. Faktor diberlakukannya hambatan non tarif ini sebagai salah satu bentuk upaya negara untuk melindungi konsumen agar terhindar

dari produk-produk yang memiliki kualitas maupun keamanan yang rendah, serta untuk melindungi produsen domestik agar tetap kuat dalam menghadapi persaingan dengan produk impor yang masuk. Sanitary and Phytosanitary (SPS) dan Technical Barriers to Trade (TBT) merupakan dua kebijakan yang paling banyak digunakan pada subsector perkebunan. Berikut merupakan jumlah kebijakan SPS dan TBT yang diterapkan oleh negara tujuan utama ekspor komoditas teh Indonesia selama tahun 2013 hingga tahun 2018 yang terdapat pada Tabel 1.

Berdasarkan table 1 dapat disimpulkan bahwa negara tujuan utama ekspor komoditas teh Indonesia yang tidak memberlakukan kebijakan SPS dan TBT yaitu Pakistan dan Rusia. Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat memberlakukan kebijakan TBT lebih

banyak dibandingkan kebijakan SPS, sementara negara-negara Uni Eropa malah sebaliknya. Amerika Serikat merupakan negara tujuan utama yang menerapkan hambatan non tarif paling banyak dengan total 36. Amerika Serikat memberlakukan kebijakan hambatan non tarif berupa SPS sebanyak 9 kebijakan yang berfokus pada kesehatan manusia, keamanan produk, protect humans from animal or plant pest or disease, dan pelabelan serta kebijakan TBT sebanyak 27 kebijakan yang terdiri dari standar nasional keamanan pangan yang mencakup standar proses pengemasan serta pelabelan. Uni Emirat Arab merupakan Negara terbanyak kedua yang memberlakukan hambatan non tarif yakni sebanyak 23 kebijakan yang hanya berupa TBT terdiri dari persyaratan pengemasan, pelabelan, pengujian, dan sertifikasi.

Tabel 1 Jumlah hambatan non tarif yang diberlakukan pada komoditas teh Indonesia di negara tujuan utama tahun 2013-2017

Negara	SPS	TBT	Total
Malaysia	0	3	3
Pakistan	0	0	0
Uni Emirat Arab	0	23	23
Amerika Serikat	9	27	36
Inggris	10	6	16
Jerman	10	6	16
Polandia [^]	10	6	16
Ukraina	1	1	2
Rusia	0	0	0
Total	40	72	112

Uni Eropa menerapkan regulasi yang berlaku untuk semua Negara anggotanya. Penyebab turunnya ekspor komoditas teh Indonesia diindikasikan karena negara-negara Uni Eropa memberlakukan berbagai macam regulasi. Hal ini karena negara-negara Uni Eropa sangat bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap kesehatan konsumen dan melindungi produsen domestiknya. Diketahui juga bahwa komoditi yang diimpor oleh negara-negara Uni Eropa khususnya komoditi pertanian memiliki standar kualitas yang tinggi. Hambatan non tarif Uni Eropa

berupa SPS yang hampir keseluruhannya mencakup aturan mengenai standar nasional keamanan pangan, kesehatan manusia, dan maximum residue limits (MRLs). MRL sendiri adalah batasan residu pestisida yang ditoleransi pada makanan atau pakan ternak ketika pestisida tersebut digunakan. Isu yang disoroti dalam penurunan ekspor komoditas teh ke negara-negara Uni Eropa ini yaitu pada aspek kesehatannya, dimana teh Indonesia mengandung senyawa antrakuinon yang berasal dari residu pestisida yang muncul akibat

proses pengeringan dan penguapan. Senyawa ini dianggap dapat memicu penyakit kanker.

1.8.2. Frequency Index dan Coverage Ratio

Pendekatan inventory merupakan salah satu cara untuk mengukur besaran suatu hambatan non tarif yang diberlakukan oleh suatu negara yang pengukurannya sederhana dengan menggunakan dua indikator yaitu frequency index dan coverage ratio. Pada frequency index jika semakin besar persentase maka menandakan semakin banyak kebijakan hambatan non tarif yang diterapkan di negara tujuan utama ekspor tersebut. Sedangkan pada coverage ratio jika semakin besar persentasenya maka menandakan bahwa semakin banyak produk impor yang terkena kebijakan hambatan non tarif di negara tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan frequency index SPS ekspor komoditas teh Indonesia ke negara tujuan utama pada periode 2013-2018 yang terdapat pada Tabel 2 bahwa penggunaan SPS berkisar antara 0% hingga 50%. Negara yang paling banyak menggunakan kebijakan SPS adalah Inggris dengan nilai 50% pada tahun 2015-2018 yang berarti bahwa

semakin banyak penggunaan hambatan non tarif di negara Inggris. Selanjutnya diikuti oleh Amerika Serikat dan negaranegara Uni Eropa seperti Jerman dan Polandia. Sementara Ukraina menggunakan SPS hanya pada tahun 2016 dan Malaysia, Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Rusia tidak menggunakan SPS sama sekali.

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai coverage ratio SPS pada ekspor komoditas teh berkisar antara 0% hingga 99.9%. Berdasarkan pada tabel, kebijakan SPS diterapkan oleh Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Polandia dengan nilai yang fluktuatif. Amerika Serikat dan Inggris memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara tujuan ekspor lainnya yang berarti bahwa semakin banyak produk impor komoditas teh yang masuk ke Amerika Serikat dan Inggris yang memiliki peraturan berupa kebijakan SPS. Ukraina memberlakukan kebijakan SPS hanya pada tahun 2016 dengan nilai 89.29%. Sedangkan untuk Malaysia, Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Rusia tidak memberlakukan kebijakan SPS pada komoditas ekspor komoditas teh Indonesia.

Tabel 2 Frequency index dan Coverage Ratio SPS (%) pada ekspor komoditas teh ke negara tujuan utama tahun 2013-2018

Negara	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	FI	CR	FI	CR	FI	CR	FI	CR	FI	CR	FI	CR
Malaysia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pakistan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uni Emirat Arab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amerika Serikat	25	89.32	25	86.22	25	82.90	0	0	25	80.88	25	80.33
Inggris	0	0	33.33	80.33	50	97.12	50	99.89	50	99.92	50	99.91
Jerman	0		25	60.63	25	48.5	25	28.48	25	31.97	25	31.23
Polandia [^]	0		33.33	66.87	33.33	56.21	50	44.97	33.33	52.54	50	52.53

Ukraina	0	0	0	0	0	33.33	89.29	0	0	0	0
Rusia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 3 menunjukkan hasil frequency index TBT ekspor komoditas teh Indonesia ke negara tujuan utama pada periode 2013-2017 bahwa penggunaan TBT berkisar antara 0% hingga 50%. Negara yang paling banyak menggunakan kebijakan TBT adalah Uni Emirat Arab pada tahun 2015 dan Inggris pada tahun 2017 dengan nilai 50%. Penggunaan TBT berfluktuatif di berbagai negara tujuan. Malaysia hanya menggunakan TBT pada tahun 2014 dan 2015 dengan masing-masing nilai 25%. Ukraina hanya menggunakan TBT pada tahun 2017 dengan nilai 33.33%. Sementara Pakistan dan Rusia tidak menggunakan TBT sama sekali.

Tabel 3 menunjukkan hasil perhitungan coverage ratio TBT pada ekspor komoditas teh Indonesia pada periode 2013-2018 bahwa dapat diketahui Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat konsisten dalam menerapkan kebijakan TBT dari tahun 2013 hingga 2017 yang sangat sering pada komoditas teh Indonesia. Inggris, Polandia, dan Jerman tidak menerapkan kebijakan TBT pada tahun 2015 dan 2016.

Malaysia hanya menerapkan kebijakan TBT pada tahun 2013 dan 2014 sedangkan Ukraina hanya pada tahun 2017. Sementara Pakistan dan Rusia tidak menerapkan kebijakan TBT pada periode tersebut.

Tabel 3 Frequency index dan Coverage Ratio TBT (%) pada ekspor komoditas teh ke negara tujuan utama tahun 2013-2018

Negara	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	FI	CR	FI	CR	FI	CR	FI	CR	FI	CR	FI	CR
Malaysia	0	0	25	86.49	25	66.80	0	0	0	0	0	0
Pakistan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uni Emirat Arab	25	87.00	25	79.39	50	89.2	33.33	70.98	25	65.20	25	64.22
Amerika Serikat	25	89.33	25	86.23	25	82.90	25	79.09	25	80.89	25	81.82
Inggris	25	97.01	33.34	80.33	0	0	0	0	50	99.92	50	99.91
Jerman	25	77.08	25	60.64	0	0	0	0	25	31.97	25	31.96
Polandia	25	64.56	33.34	66.87	0	0	0	0	33.34	52.54	33.34	52.52
Ukraina	0	0	0	0	0	0	0	0	33.34	95.47	33.34	95.48
Rusia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KESIMPULAN

Kebijakan hambatan non tarif yang diberlakukan pada komoditas teh Indonesia oleh negara tujuan utama lebih banyak diberlakukan kebijakan TBT dibandingkan dengan kebijakan SPS. Amerika Serikat merupakan negara tujuan

utama ekspor yang paling banyak memberlakukan hambatan non tarif pada kebijakan SPS dan TBT.

GDP riil negara tujuan utama ekspor, nilai tukar riil negara tujuan utama ekspor, jarak ekonomi, dan kebijakan hambatan non tarif (SPS dan TBT) yang diukur melalui

perhitungan coverage ratio merupakan faktor yang dapat mempengaruhi ekspor komoditas teh Indonesia.

Kebijakan SPS memiliki pengaruh nyata yang negatif terhadap ekspor komoditas teh Indonesia, sedangkan kebijakan TBT memiliki pengaruh nyata positif terhadap ekspor komoditas teh Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abolagba EO, Agbonkpolor BN, Onyekwere NC, Umar HY. 2010. Determinants of Agricultural Exports, *J Hum Ecol.* 29(3): 181-184.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Nilai PDB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha [internet]. [diunduh 2019 Juli 2]. Tersedia pada: <http://www.bps.go.id>.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Teh Indonesia 2017 [internet]. [diunduh 2019 Juli 2]. Tersedia pada <http://www.bps.go.id>.
- Bratt, M. 2014. Estimating The Bilateral Impact of Non Tariff Measures (NTMs). [Working Paper 2014]. Geneva: Universite de Geneve. [CEPII] Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales. Data jarak geografis [internet]. [diunduh 2019 Juli 2]. Tersedia pada: http://www.cepii.fr/distance/dist_cepii.zip
- Dahar, D. 2014. Analisis Dampak Kebijakan Non Tarif Terhadap Kinerja Ekspor Hortikultura Indonesia ke Negara-negara ASEAN +3. [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Darhyati AT, Rifin A, Suharno. 2017. Impact of Non Tariff Measure on Indonesian Cacao Exports, *Int. J. Agr. Syst.* 5(2): 175-184.
- Darsono, RG. 2016. Estimasi Ekuivalen Tarif Impor dan Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ekspor Teh Indonesia ke Negara Tujuan Utama [Skripsi]. Bogor (ID): Departemen Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
- Disdier A-C, Lionel F, Mondher M. 2007. The Impact of Regulations on Agricultural Trade: Evidence From SPS and TBT Agreements. [Working Paper].
- Fakhrudin, U. 2008. Kebijakan Hambatan Perdagangan Atas Ekspor Produk Indonesia di Negara Mitra Dagang. Jakarta (ID): Litbang Perdagangan
- Firdaus, M. 2011. Aplikasi Ekonometrika untuk Data panel dan Time Series. Bogor (ID): IPB Press.
- Ginting, AM. 2013. Pengaruh Nilai Tukar terhadap Ekspor Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 7(1): 1-18.
- Gujarati D. 2004. Basic Econometrics, 4th Edition. The McGraw-Hill Companies.
- Haditaqy, A. 2015. Analisis Daya Saing dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan Ekspor Teh Hitam Indonesia ke Negara Tujuan Ekspor [Skripsi]. Bogor (ID): Departemen Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Hartoyo, S. 2013. The Impact of Rural Road Rehabilitation on Rice Productivity and Farmers Income in Kemang Village, Cianjur, West Java, Indonesia. *Jurnal ISSAAS* .19(2):18-29
- Mankiw, G. 2006. Makroekonomi. Liza F, Nurmawan I, penerjemah. Jakarta (ID): Erlangga. Terjemahan dari *Macroeconomic* 6th Edition. Ed ke-6.
- Mejaya AS, Fanani D, Mawardi MK. 2016. Pengaruh Produksi, Harga Internasional, dan Nilai Tukar terhadap Volume Ekspor. *JAB* 35(2):20-29.
- Nugroho, A. 2004. Analisis Perilaku Dinamik Ekspor Teh Hitam (Studi Kasus Di PTPN VIII) [Skripsi]. Bogor (ID): Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Oktaviani R, Novianti T, Widyastutik. 2009. Teori Kebijakan Perdagangan Internasional dan Aplikasinya di Indonesia. Bogor (ID): Departemen

- Ilmu Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Salvatore, D. 1997. *Ekonomi Internasional*. Edisi Kelima. Jakarta [ID]: Erlangga.
- Sari AR, Hakim DB, Anggraeni L. 2014. Analisis Pengaruh Non-Tariff Measures Ekspor Komoditi Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Negara Tujuan Utama. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 3(2):11-135.
- Trabelsi, I. 2013. *Agricultural trade face to Non tariff barriers: A gravity model for the Euro-Med area*. Tunisia: University of SFAX.
- [UN COMTRADE]. 2019. Data nilai ekspor negara eksportir teh hitam di dunia periode tahun 2017 [internet]. [diunduh 2019 Juli 2]. Tersedia pada: <http://comtrade.un.org>
- UNCTAD. 2013. *Non Tariff Measures to Trade: Economic and Policy Issues for Developing Countries*. Geneva. Switzerland.
- [WITS] World Integrated Trade Solution. 2019. Data Ekspor-Impor Teh Hitam Indonesia ke negara tujuan utama 2013-2018 [internet]. [terhubung berkala]. Tersedia pada: www.wits.worldbank.org
- [WITS] World Integrated Trade Solution. 2019. Data Non Tariff Measures [internet]. [terhubung berkala]. Tersedia pada: www.wits.worldbank.org
- [WORLDBANK]. 2019. Data GDP riil (konstan 2010) 2013 - 2018 [internet]. [diunduh 2019 Juli 2]. Tersedia pada: www.data.worldbank.org
- [WORLDBANK]. 2019. Data IHK 2013 - 2018 [internet]. [diunduh 2019 Juli 2]. Tersedia pada: www.data.worldbank.org
- [WORLDBANK]. 2019. Data nilai tukar nominal 2013 - 2018 [internet]. [diunduh 2019 Juli 2]. Tersedia pada: www.data.worldbank.org
- WTO. 2019. *Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP)*. Tersedia pada: [di i-tip.wto.org/goods](http://di-i-tip.wto.org/goods)